

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Peranan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian negara pada sektor perbankan adalah dengan mempertahankan kinerja bank. Jika bank dalam kondisi baik, maka tidak terjadi penurunan kinerja bank sehingga perekonomian suatu negara tetap stabil. Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan media publikasi yang menyajikan data mengenai perbankan syariah di Indonesia. SPS OJK diterbitkan secara bulanan oleh Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan di Indonesia. Di dalam SPS OJK terdapat penilaian kinerja Perbankan Syariah, salah satunya Bank Umum Syariah.

Mulai bulan Mei 2014, data SPS yang merupakan kumpulan data Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) disusun bersumber dari laporan BUS-UUS sesuai dengan PBI No.15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebelumnya laporan dari BUS-UUS disusun berdasarkan PBI No. 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah¹.

Menurut laporan keuangan SPS OJK November 2021, Bank Umum Syariah Indonesia dalam periode tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami perubahan jumlah bank. Bank Umum Syariah Indonesia konsisten berjumlah 14 bank hingga bulan Februari 2021. Bank Umum Syariah Indonesia mengalami penurunan jumlah bank yaitu 12 bank mulai bulan Maret 2021 sampai bulan November 2021. Hal ini dikarenakan bahwa adanya gabungan bank BUMN yang menjadi Bank Syariah Indonesia yaitu, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistics November 2021* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022), i.

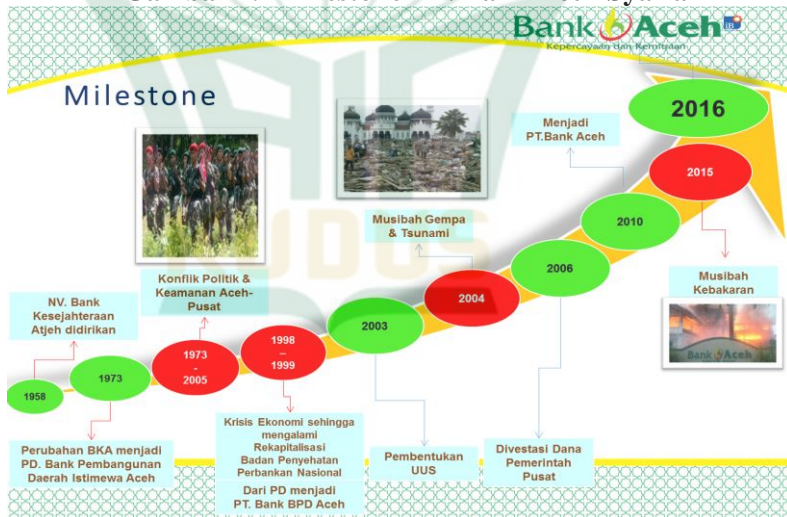
2. 12 Bank Umum Syariah pada Laporan SPS OJK

Berikut ini gambaran Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat pada laporan SPS OJK antara lain: PT. Bank Aceh Syariah; PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah; PT. Bank Muamalat Indonesia; Tbk, PT. Bank Victoria Syariah; PT. Bank Jabar Banter Syariah; PT. Bank Mega Syariah; PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk; PT. Bank Syariah Bukopin; PT. BCA Syariah; PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah; PT. Bank Aladin Syariah dan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.² Apabila dijelaskan masing-masing gambaran Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat pada laporan SPS OJK, maka pemaparannya sebagai berikut:

a. PT. Bank Aceh Syariah

Pendirian Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Perjalanan PT. Bank Aceh Syariah dijelaskan berupa milestone dan roadmap yang mencerminkan awal pendirian hingga perjalanan sejarah berikutnya. Hal ini dijelaskan dalam gambar 4.1 dan 4.2 berikut:

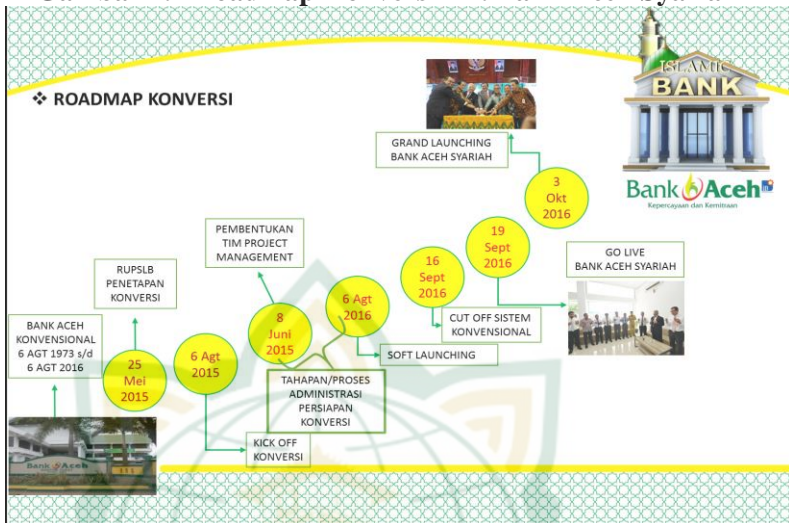
Gambar 4.1 Milestone PT. Bank Aceh Syariah



Sumber: www.bankaceh.co.id

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistics November 2021* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022), 5.

Gambar 4.2 Roadmap Konversi PT. Bank Aceh Syariah



Sumber: www.bankaceh.co.id

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah sebagaimana gambar tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan. Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah mencakup kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dan kegiatan pelayanan jasa bank.³

³ "Sejarah Singkat Bank Aceh," Bank Aceh, diakses pada 3 Juni, 2022. www.bankaceh.co.id

b. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.08 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki Kantor yang berjumlah 50 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas dan 7 kantor pelayanan. Guna mendukung kualitas pelayanan Bank NTB Syariah 255 ATM yang tersebar diseluruh kota/Kabupaten se-NTB. Bank NTB Syariah didukung oleh karyawan dan karyawan sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 1.433 orang.⁴

c. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiuts Tsani 1412 H (1 Nopember 1991), Pendirian Bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa cendekiawan Muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) serta Pemerintah ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka, beberapa pengusaha Muslim, serta masyarakat. Bentuk dukungan dari masyarakat yaitu

⁴ PT. Bank NTB Syariah, Sejarah Bank NTB Syariah, www.bankntbsyariah.co.id

berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan.

Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 milyar sehingga menjadi Rp 106 milyar sebagai wujud dukungannya serta mendapat dukungan langsung dari Presiden dan mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H (1 Mei 1992). Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk berubah nama menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pada tahun yang sama, Bank Muamalat pertama kalinya membuka cabang internasional di Kuala Lumpur Malaysia dan melaksanakan pergantian manajemen pada bulan Juli 2009. Berdasarkan laporan keuangan (audited), pada akhir 2009 total aset Bank Muamalat mencapai Rp 16.027,18 miliar atau tumbuh 27,09% yang sebagian besarnya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sebesar Rp 13.316,90 miliar. Dan dari Dana Pihak Ketiga yang terkumpul tersebut sebesar Rp 11.428,01 miliar disalurkan pada aktivitas Pembiayaan serta investasi syariah lainnya.⁵

d. PT. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna. Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah. Kegiatan usaha PT Bank Victoria Syariah secara otomatis juga berubah. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010.

Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank

⁵ “Profil Bank Muamalat,” Bank Muamalat Indonesia, diakses pada 3 Juni 2022. www.bankmuamalat.co.id

Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.⁶

e. PT. Bank Jabar Banten Syariah

Pendirian bank BJB syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. BJB syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, kantor cabang pembantu 55 (lima puluh lima), jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama.⁷

f. PT. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah pertama kali berdiri pada tahun 27 juli 2004. Sejarahnya berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yang diakuisisi oleh CT Corpora melalui Mega Corpora dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Sejak awal akuisisi, para pemegang saham memang ingin mengubah Bank Umum Tugu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia

⁶ “Profil Sejarah Bank Victoria Syariah,” Bank Victoria Syariah, diakses pada 3 Juni 2022. <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil>

⁷ “Profil Bank Jabar Banten Syariah,” Bank Jabar Banten Syariah, diakses pada 3 Juni 2022. www.bjbsyariah.co.id

melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004. BSMI resmi beroperasi pada tanggal 25 Agustus 2004. Sejak saat itu ada beberapa perubahan terjadi pada Bank Mega Syariah, di antaranya:

- 1) Pada tanggal 7 November 2007 pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo Bank Syariah Mega Indonesia atau BSMI ke bentuk logo PT Bank Mega yang menjadi sister company-nya. Hanya saja BSMI menggunakan warna yang sedikit berbeda dengan PT Bank Mega, ditambah tulisan Syariah dengan warna ungu.
- 2) Pada tanggal 2 November 2010 PT Bank Mega Syariah Indonesia mengganti namanya menjadi PT Bank Mega Syariah melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/75/KEP.GBI/DpG/2010.
- 3) Pada tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah mendapatkan status sebagai Bank devisa. Status ini membuatnya dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya jangkauan bisnisnya pun semakin luas tidak hanya di ranah domestik namun juga dan internasional.
- 4) Di tahun 2009 tepatnya pada tanggal 8 April mendapatkan izin dari departemen agama republik Indonesia sebagai bank yang dapat menerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Izin ini menjadi salah satu landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan akan perbankan syariah umat muslim di Indonesia.

Demi mewujudkan visi Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa, Bank Mega Syariah terus melakukan sejumlah inovasi dan mengembangkan usahanya. Di antaranya dengan memperkuat modal dasar bank yang semula Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan begitu pun modal yang disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,84 miliar. Untuk saat ini modal tersebut telah mencapai Rp787,204 miliar. Untuk mewujudkan visi di atas, Bank Mega Syariah juga melakukan pengembangan produk perbankan dengan memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Pengembangan produk ini juga diikuti dengan penambahan infrastruktur layanan

perbankan yang semakin lengkap dan luas termasuk di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia.⁸

g. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Dubai Syariah Bank”), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.⁹

h. PT. Bank Syariah Bukopin

PT Bank KB Bukopin Syariah (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor

⁸ Raditya Wardana, “Profil Bank Mega Syariah dan Produk Unggulannya 2022” 18 Maret, 2022. <https://lifepal.co.id/media/bank-mega-syariah/>

⁹ “Panin Dubai Syariah Bank: Tentang Kami,” Panin Dubai Syariah Bank, diakses pada 3 Juni 2022. <https://paninbanksyariah.co.id/>

24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.

Pada tanggal 30 Juni 2021 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) yang dituangkan ke dalam Akta No. 02 tanggal 6 Juli 2021 dan telah mendapat persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-27/PB.101/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan KEP-53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021. Sampai dengan Oktober 2021 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 6 (enam) unit mobil kas keliling, dan 122 (seratus dua puluh dua) Kantor Layanan Syariah Bank Umum, serta 33 (tiga puluh tiga) mesin ATM KBBS dengan jaringan Prima dan ATM Bank KB Bukopin.¹⁰

¹⁰ “Profil Perusahaan KB Bukopin Syariah,” KB Bukopin Syariah, diakses pada 3 Juni, 2022. <https://www.kbbukopinsyariah.com/id/tentang-kami/profil-perusahaan>

i. PT. BCA Syariah

BCA Syariah hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan syariah yang andal dan terpercaya. PT. Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi Halo BCA di 1500888. Jaringan cabang BCA Syariah tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, Kediri, Pasuruan, dan Panakkukang.¹¹

j. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama "PT Bank BTPN Tbk") di 2010, BTPN Syariah telah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen prasejahtera produktif. Sesuai amanah

¹¹ "Informasi Umum BCA Syariah," BCA Syariah, diakses pada 3 Juni, 2022. <https://www.bcasyariah.co.id/informasi-umum>

untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini, BTPN Syariah pun memberikan akses, layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah sehingga mereka dapat memantapkan niat untuk mewujudkan impian meraih kehidupan yang lebih baik.

Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) dan proses konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta (“BSPD”). Sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, produk dan layanan bagi nasabah BTPN Syariah terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian, BTPN Syariah dapat terus memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan mewujudkan Rahmatan Lil Alamin.¹²

k. PT. Bank Aladin Syariah

1) Profil PT. Bank Aladin Syariah

Aladin Bank membuka dan mempermudah akses layanan perbankan syariah berbasis digital agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan pelaku industri di berbagai sektor. Keamanan dan kenyamanan nasabah juga menjadi prioritas kami dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi guna mengembangkan produk-produk pendanaan, pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya, seperti transfer dana, pembayaran, pembelian dan lain-lain.¹³

¹² “Profil BTPN Syariah,” BTPN Syariah, diakses pada 3 Juni, 2022. https://www.btpnsyariah.com/in_ID/web/guest/profil

¹³ “Tentang Aladin,” Bank Aladin Syariah, diakses pada 3 Juni, 2022. <https://aladinbank.id/tentang-aladin/>

2) Nilai-nilai Utama PT. Bank Aladin Syariah

a) Beretika dan Patuh Syariah

Dalam menjalankan kegiatannya, Aladin Bank memiliki identitas etika dan kepatuhan syariah. Hal ini diwujudkan dengan menerapkan nilai-nilai Islam, antara lain kepercayaan, keadilan, kejujuran, menghormati sesama, kebenaran, dan toleransi.

b) Mudah Diakses

Aladin Bank menyediakan layanan dan produk perbankan bagi siapa saja. Teknologi digital memungkinkan masyarakat Indonesia mengakses layanan perbankan syariah di mana saja dengan mudahnya. Dukungan dan layanan pun tersedia bagi nasabah yang membutuhkan bantuan.

c) Kolaboratif

Senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan mitra bisnis dan menyalurkan dananya pada sektor-sektor yang produktif untuk menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang sehat, produktif, dan menguntungkan bagi nasabahnya.

d) Integritas dan Amanah

Kepercayaan yang diberikan menjadi bekal Aladin Bank untuk selalu menjaga integritasnya dan amanah dalam memberikan berbagai pilihan layanan dan produk yang bermanfaat bagi nasabah.

1. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

Pada tanggal 1 Februari 2021 M / 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini bertujuan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah agar menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik dengan didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ini diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta menjadi cerminan perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan

memberikan kebaikan bagi seluruh alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).¹⁴

B. Analisis Data

Berikut adalah analisis data pengukuran kinerja BUS di Indonesia menggunakan metode *IPI*, *SCnP* dan *SMI*. *IPI* merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam bank syariah. *SCnP* adalah alat pengukuran kinerja keuangan berdasarkan pengamatan syariah dengan hasil perhitungan yang menempatkan bank sampel ke dalam empat kuadran. Sedangkan *SMI* adalah konsep penilaian kinerja perbankan syariah yang dibagi menjadi 3 tujuan yang telah ditentukan.

1. Rasio-rasio *IPI*

Rasio-rasio dalam metode *IPI* yang dihitung untuk mengukur kinerja perbankan syariah antara lain:

a. *Profit Sharing Ratio*

Berikut ini adalah hasil pengukuran *Profit Sharing Ratio* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran *Profit Sharing Ratio IPI*

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
<i>Mudharabah</i>	5.477	5.413	4.098	3.856
<i>Musarakah</i>	68.644	84.582	92.279	91.352
Total Pembiayaan	202.298	225.146	246.532	249.826
<i>Profit Sharing Ratio</i>	36,64%	39,97%	39,09%	38,11%

Sumber: Data Diolah 2022, IPI

¹⁴ "Bank BSI: Tentang Kami," BSI, diakses pada 3 Juni, 2022. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>

b. *Zakat Performance Ratio*

Berikut ini adalah data pengukuran *Zakat Performance Ratio* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran *Zakat Performance Ratio* IPI

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Zakat	1.000	1.403	1.305	1.636
<i>Net Asset</i>	299.312	332.449	374.836	413.531
<i>Zakat Performance Ratio</i>	0,33%	0,42%	0,35%	0,4%

Sumber: Data Diolah 2022, IPI

c. *Equitable Distribution Ratio*

Berikut ini adalah data pengukuran *Equitable Distribution Ratio* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.3 Hasil Pengukuran *Equitable Distribution Ratio* IPI

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Zakat dan Pajak	1.000	1.403	1.305	1.636
Total Pendapatan	25.377	25.570	25.998	28.058
Jumlah yang Didistribusikan	31.864	34.271	33.116	29.105
<i>Equitable Distribution Ratio</i>	130,71%	141,81%	134,11%	110,15 %

Sumber: Data Diolah 2022, IPI

d. *Director Employees Welfare Ratio*

Berikut ini adalah data pengukuran *Director Employees Welfare Ratio* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.4 Hasil Pengukuran *Director Employees Welfare Ratio IPI*

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata Gaji Direktur	2	2	2	2
Rata-Rata Kesejahteraan Karyawan	0,133	0,144	0,145	0,141
<i>DEWR</i>	1505,27%	1385,05%	1374,54%	1414,86%

Sumber: Data Diolah 2022, IPI

e. *Islamic Investment Versus Non Islamic Investment Ratio*

Berikut ini adalah data pengukuran *Islamic Investment Versus Non Islamic Investment Ratio* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran *Islamic Investment Versus Non Islamic Investment Ratio IPI*

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Investasi Halal	0	0	0	0
Investasi Non Halal	216.652	237.241	248.384	282.478
Rasio Investasi Halal	0%	0%	0%	0%

Sumber: Data Diolah 2022, IPI

f. *Islamic Income Versus Non Islamic Income Ratio*

Berikut ini adalah data pengukuran *Islamic Income Versus Non Islamic Income Ratio* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran *Islamic Income Versus Non Islamic Income Ratio IPI*

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Halal	17.113	19.227	20.561	21.690
Pendapatan Non Halal	36.648	39.625	39.808	37.236
Rasio Pendapatan Halal	31,83%	32,67%	34,06%	36,81%

Sumber: Data Diolah 2022, IPI

2. Rasio-rasio SCnP

a. *Sharia Conformity*

Kinerja keuangan metode *Sharia Conformity* dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut:

1) Investasi syariah (*Islamic Investment*)

Berikut ini adalah data pengukuran *Islamic Investment Ratio* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.7 Hasil Pengukuran *Islamic Investment Ratio SCnP*

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
<i>Islamic Investment</i>	0	0	0	0
<i>Non-Islamic Investment</i>	216.652	237.241	248.384	282.478
Rasio <i>Islamic Investment</i>	0%	0%	0%	0%

Sumber: Data Diolah 2022, SCnP

2) Pendapatan Syariah (*Islamic Income*)

Berikut ini adalah data pengukuran *Islamic Income Ratio* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.8 Hasil Pengukuran *Islamic Income SCnP*

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
<i>Islamic Income</i>	17.113	19.227	20.561	21.690
<i>Non-Islamic Income</i>	36.648	39.625	39.808	37.236
Rasio <i>Islamic Income</i>	31,83%	32,67%	34,06%	36,81%

Sumber: Data Diolah 2022, *SCnP*

3) Rasio Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Berikut ini adalah data pengukuran *Profit Sharing Ratio* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.9 Hasil Pengukuran *Profit Sharing SCnP*

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
<i>Mudharabah</i>	5.477	5.413	4.098	3.856
<i>Musyarakah</i>	68.644	84.582	92.279	91.352
Total Pembiayaan	202.298	225.146	246.532	249.826
Rasio <i>Profit Sharing</i>	36,64%	39,97%	39,09%	38,11%

Sumber: Data Diolah 2022, *SCnP*

b. *Profitability*

Pengukuran terhadap kinerja keuangan di dalam metode *SCnP* diukur menggunakan salah satu indikator keuangan yaitu profitabilitas (*profitability*). Profitabilitas dapat diukur dengan rasio yang berasal dari indikator berikut:

1) *Return on Asset (ROA)*

Berikut ini adalah data pengukuran *Return on Asset* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.10 Hasil Pengukuran *Return on Asset SCnP*

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Bersih	3.806	5.598	5.087	6.619
Rata-Rata Total Asset	298.044	323.438	362.692	397.821
Rasio <i>ROA</i>	1,28%	1,73%	1,40%	1,66%

Sumber: Data Diolah 2022, SCnP

2) *Return on Equity (ROE)*

Berikut ini adalah data pengukuran *Return on Equity* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.11 Hasil Pengukuran *Return on Equity SCnP*

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Bersih	3.806	5.598	5.087	5.830
Modal Investor	257.606	288.978	322.853	346.631
Rasio <i>ROE</i>	1,48%	1,94%	1,58%	1,68%

Sumber: Data Diolah 2022, SCnP

3) *Profit Margin*

Berikut ini adalah data pengukuran *Profit Margin* pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.12 Hasil Pengukuran *Profit Margin SCnP*

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Bersih	3.806	5.598	5.087	5.830
Pendapatan yang Diterima	25.377	25.570	25.998	28.058
Rasio <i>Profit Margin</i>	14,99%	21,89%	19,57%	20,78%

Sumber: Data Diolah 2022, SCnP

3. Rasio-Rasio SMI

Mustafa Omar dan Dzulastru Abdul Rozak (2008 dan 2010) memperkenalkan metode pengukuran *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah berdasarkan *maqashid index* yang bersandar pada konsep *maqashid syariah* Abu Zahrah. SMI dibagi menjadi 3 variabel sebagai tujuannya yaitu pendidikan individu (*Tahdzib al-Fard*), menegakkan keadilan (*Iqamah al-Adl*) dan meningkatkan kesejahteraan (*Jalb al-Mashlahah*). Selanjutnya dari tiga variabel tersebut dicabangkan lagi menjadi sepuluh rasio kinerja.¹⁵ Rasio-rasio kinerja yang dijadikan alat ukur di antaranya:

a. Tujuan 1 Pendidikan Individu (*Tahdzib al-Fard*):

1) Hibah Pendidikan dan Pelatihan

Berikut ini adalah data pengukuran rasio hibah pendidikan dan pelatihan pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.13 Hasil Pengukuran Rasio Hibah Pendidikan dan Pelatihan SMI

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Hibah Pendidikan dan Pelatihan	210	281	169	127
Total Biaya	21.571	19.972	20.911	22.228
Rasio Hibah Pendidikan dan Pelatihan	0,97%	1,41%	0,81%	0,57%

Sumber: Data Diolah 2022, SMI

¹⁵ Mohammed, dkk, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework," (presentasi, IIUM International Accounting Conference (INTAC) IV, Putra Jaya Marroitt, 25 Juni, 2008), 16.

2) Penelitian

Berikut ini adalah data pengukuran rasio penelitian pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.14 Hasil Pengukuran Rasio Penelitian SMI

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Biaya Penelitian	13	16	11	3
Total Biaya	21.571	19.972	20.911	22.228
Rasio Biaya Penelitian	0,06%	0,08%	0,05%	0,01%

Sumber: Data Diolah 2022, SMI

3) Publisitas

Berikut ini adalah data pengukuran rasio publisitas pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.15 Hasil Pengukuran Rasio Publisitas SMI

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Biaya Publisitas/Promosi	326	406	252	270
Total Biaya	21.571	19.972	20.911	22.228
Rasio Biaya Publisitas/Promosi	1,51%	2,03%	1,20%	1,21%

Sumber: Data Diolah 2022, SMI

b. Tujuan 2 Menegakkan Keadilan (*Iqamah al-Adl*):

4) Pengembalian yang Adil

Berikut ini adalah data pengukuran rasio pengembalian yang adil pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.16 Hasil Pengukuran Rasio Pengembalian yang Adil SMI

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
<i>Profit Equalization Reserve (PER)</i>	3.889	4.348	4.409	3.661
<i>Net on Investment Income</i>	295	388	504	453
Rasio <i>Profit Equalization Reserve (PER)</i>	1318,30%	1120,62%	874,80%	808,17%

Sumber: Data Diolah 2022, SMI

5) Fungsi Distribusi

Berikut ini adalah data pengukuran rasio fungsi distribusi pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.17 Hasil Pengukuran Rasio Fungsi Distribusi SMI

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
<i>Mudharabah</i>	5.477	5.413	4.098	3.856
<i>Musarakah</i>	68.644	84.582	92.279	91.352
Total Pembiayaan	202.298	225.146	246.532	249.826
Rasio Fungsi Distribusi	36,64%	39,97%	39,09%	38,11%

Sumber: Data Diolah 2022, SMI

6) Produk Non Bunga

Berikut ini adalah data pengukuran rasio produk non bunga pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.18 Hasil Pengukuran Rasio Produk Non Bunga SMI

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Non Bunga	17.113	19.227	20.561	21.690
Total Pendapatan	36.648	39.625	39.808	37.236
Rasio Produk Non Bunga	31,83%	32,67%	34,06%	36,81%

Sumber: Data Diolah 2022, SMI

c. Tujuan 3 Meningkatkan Kesejahteraan (*Jalb al-Mashlahah*):

7) Laba Kembali

Berikut ini adalah data pengukuran rasio laba kembali pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.19 Hasil Pengukuran Rasio Laba Kembali SMI

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Laba Bersih	3.806	5.598	5.087	5.830
Total Aset	316.691	350.364	397.073	429.733
Rasio Laba Kembali	1,20%	1,60%	1,28%	1,36%

Sumber: Data Diolah 2022, SMI

8) Transfer Pendapatan Pribadi

Berikut ini adalah data pengukuran rasio transfer pendapatan pribadi pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.20 Hasil Pengukuran Rasio Transfer Pendapatan Pribadi SMI

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Zakat	1.000	1.403	1.305	1.636
<i>Net Aset</i>	299.312	332.449	374.836	413.531
Rasio Pendapatan Personal	0,33%	0,42%	0,35%	0,40%

Sumber: Data Diolah 2022, SMI

9) Investasi Pada Sektor Riil

Berikut ini adalah data pengukuran rasio investasi pada sektor riil pada BUS Indonesia tahun 2018-2021:

Tabel 4.21 Hasil Pengukuran Rasio Investasi Pada Sektor Riil SMI

(Nominal dalam Miliar Rupiah dan Rasio Kinerja)	2018	2019	2020	2021
Penyaluran Investasi pada Sektor Riil	17.427	19.524	21.739	24.164
Total Penyaluran Investasi	48.773	53.207	56.203	55.348
Rasio Investasi pada Sektor Riil	35,73%	36,69%	38,68%	43,66%

Sumber: Data Diolah 2022, SMI